



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah kabupaten Barito Kuala.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
8. Tim Fasilitasi PKD adalah tim yang memfasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dari Kecamatan.
9. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral
10. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II
PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 2

- (1) ADD adalah bagian dari pendapatan Desa yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Barito Kuala setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) ADD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah pada pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (2) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa dan merupakan bagian dari APBDesa.

Pasal 4

Penganggaran bantuan keuangan ADD kepada Pemerintah Desa pada APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 80.094.861.774,- (delapan puluh milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dibagi kepada 195 (seratus sembilan puluh lima) Desa di Kabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, tingkat kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan keterjangkauan Desa; dan
 - c. Alokasi Kinerja.
- (2) Perhitungan besaran ADD untuk setiap Desa berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memperhitungkan kebutuhan tunjangan dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan jaminan sosial BPD, serta honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan Staf Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Alokasi anggaran untuk perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi secara proporsional setelah dikurangi kebutuhan anggaran untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2).
- (4) Alokasi kinerja untuk perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memperhitungkan kecepatan dan ketepatan pengajuan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022 serta memperhatikan capaian status Desa Tahun Anggaran 2022 masing-masing bagi 10 (sepuluh) desa di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Pasal 6

- (1) Besaran ADD dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADD_x = ADDBP_x + ADDP_x + ADDK_x$$

- ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
- ADDBP_x = Alokasi Dana Desa untuk Belanja Pegawai Desa x
- ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x
- ADDK_x = Alokasi Dana Desa Kinerja untuk Desa x

- (2) Besaran ADD untuk Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Staf Desa, dan Insentif RT/RW ditetapkan tersendiri dalam peraturan Bupati.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADDP_x = \frac{BD_x}{\sum BD} \times (ADDP)$$

$ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proporsional desa x
 BD_x = Nilai Bobot Desa x
 $\sum BD$ = Jumlah Seluruh Nilai Bobot Desa
 $ADDP$ = Jumlah Alokasi Dana Desa proporsional Kabupaten

(4) Penentuan Nilai Bobot Desa di hitung dengan rumus, yaitu :

$$BD_x = a_1.KV_x + a_2.KV_2x + a_3.KV_3x + \dots + a_n.KV_{nx}$$

BD_x = Nilai Bobot Desa x
 a_1, a_2, \dots, a_n = Angka Bobot masing-masing Variabel
 KV = Koefisien Variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya

(5) Penetapan Rincian ADD dan penghitungan pembagian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pendapatan ADD bagi setiap Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang wajib dianggarkan pada pendapatan APBDesa tahun 2023.
- (2) Penganggaran belanja yang didanai dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPDesa tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa.
- (3) Apabila terjadi perubahan besaran ADD maka APBDesa harus menyesuaikan dengan melakukan perubahan APBDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) Prioritas ADD digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (2) Prioritas ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan antara lain :
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Penyediaan operasional Pemerintah Desa;
 - e. Penyediaan tunjangan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK-JKM) bagi BPD;
 - f. Penyediaan operasional BPD;
 - g. Penyediaan Honorarium dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK-JKM) bagi Staf Desa;
 - h. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - i. Penyediaan insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - j. Penyediaan tunjangan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK-JKM) bagi Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - k. Seleksi Perangkat Desa;
 - l. Penyelenggaraan Lomba Desa;

- m. Penyediaan Operasional Penegasan dan Penetapan Batas Batas Desa;
 - n. Penyediaan Honorarium Penegasan dan Penetapan Batas Batas Desa;
 - o. Penyediaan Operasional Pengamanan Aset Desa; dan
 - p. Kegiatan pada sub bidang penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam hal ketersediaan ADD tidak mencukupi untuk mendanai penyediaan insentif/operasional Rukun Tetangga/ Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dapat dipenuhi dari sumber dana selain ADD.

Pasal 9

- (1) Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), ADD dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Teknis Kegiatan prioritas yang didanai dari ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBDesa.

BAB V TATA CARA PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membuka RKD pada bank pemerintah terdekat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan November sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dana perimbangan ditransfer dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran ADD dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa dan ditujukan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD tahap I, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. peraturan Desa tentang APBDesa;
 - d. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa; dan
 - e. dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas Desa.

- (2) Penyaluran ADD tahap II, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
- (3) Penyaluran ADD tahap III, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan ADD tahap II dan Laporan Keuangan BUMDesa tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD setiap tahapan sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pencairan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Camat
 - b. surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai);
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
 - e. pakta integritas (bermaterai); dan
 - f. surat pernyataan penggunaan ADD

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), Tim Fasilitasi PKD Kecamatan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan dan pemeriksaan SPJ untuk kelengkapan berkas permohonan pencairan Desa yang bersangkutan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa beserta lampirannya;
 - c. lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan dari Tim Fasilitasi PKD Kecamatan; dan
 - d. lembar pemeriksaan SPJ ADD
- (2) Berdasarkan surat pengantar pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala menerbitkan surat pengantar pencairan ADD kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri :
 - a. surat permohonan pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa;
 - b. ceklist kelengkapan dokumen pencairan dari Tim fasilitasi PKD Kecamatan;
 - c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai)
 - d. surat pernyataan penggunaan ADD;
 - e. pakta integritas (bermaterai);
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai); dan
 - g. print out rekening koran
- (3) Pengajuan pencairan ADD tahap II dan III dapat dilaksanakan Desa apabila telah mempertanggungjawabkan dana tahap sebelumnya sebesar paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2022 terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :

- a. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD sesuai tahapan.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Kepala Desa kepada Camat cq. Tim Fasilitasi PKD Kecamatan paling lambat minggu kedua tahun berikutnya.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Kepala desa kepada Camat cq. Tim Fasilitasi PKD Kecamatan sesuai tahapan pengajuan penyaluran ADD.
- (7) Tim Fasilitasi PKD Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa di wilayah kecamatan secara bertahap dilampiri laporan dari tingkat desa, dilaporkan kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk laporan bulanan setiap minggu kedua bulan berikutnya dan untuk laporan akhir tahun paling lambat minggu kedua bulan januari tahun berikutnya.
- (8) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD secara langsung pada Desa yang bersangkutan.
- (9) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi :
- a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. masalah yang dihadapi; dan
 - c. hasil akhir penggunaan ADD.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. pada organisasi Pemerintah Desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- c. diluar organisasi Pemerintah Desa, pengawasan dilakukan oleh :
 - 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 - 2. Inspektorat Kabupaten sebagai aparat pengawasan internal Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
 - 3. Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal sampai dengan minggu keempat bulan November tahun anggaran berjalan, Desa belum mengajukan permohonan pencairan ADD, sisa dana ADD tersebut tidak bisa dicairkan lagi ke RKD dan tidak bisa dianggarkan kembali pada pendapatan Desa tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat Silpa ADD di RKD, Kepala Desa wajib menganggarkan kembali pada rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa lebih penganggaran ADD tersebut.
- (3) Sisa lebih penganggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Rencana Anggaran Kas telah ditetapkan.
- (4) Sisa Lebih perhitungan ADD tahun anggaran 2022 dapat digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana ADD dan tidak dibenarkan membuka rekening bank selain RKD yang sudah dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Kaur Keuangan wajib memungut pajak-pajak Negara dan pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku dan menyetorkan pungutan pajak Negara ke Kas Negara dan pajak Daerah ke Kas Daerah.
- (3) Penyimpanan uang tunai oleh kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat lambatnya pada minggu ke empat bulan Desember wajib disetorkan kembali ke RKD.
- (4) Kegiatan pembangunan fisik desa setiap tahapan penyaluran ADD dilaksanakan foto kegiatan mulai 0 %, 50 % dan 100 %;
- (5) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak diperbolehkan tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain;
- (6) Anggaran ADD terintegrasi dalam APBDesa dan Pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam penggunaan ADD dapat dikenakan Sanksi dengan mempedomani ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melalui pelayanan informasi mengenai ADD Tahun Anggaran 2023.

- (3) Pelayanan informasi mengenai ADD Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan sebagai berikut:
- mengenai program dan kegiatan pada Badan Penelitian Pengembangan Pembangunan (Bapelitbang) Kabupaten Barito Kuala.
 - mengenai sistem pertanggungjawaban keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala.
 - mengenai pembinaan administrasi, pelatihan, monitoring laporan hasil kinerja pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.
 - pemantauan/pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa serta mekanisme pencairan dan laporan keuangan oleh Camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan setempat.
 - pemeriksaan hasil pembangunan dan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 19

Format lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan desa dan lembar pemeriksaan SPJ desa dari Tim Fasilitasi PKD kecamatan, surat pertanggungjawaban mutlak telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya, surat pengantar dari desa ke Dinas PMD, surat permohonan pencairan ADD, kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai), surat pernyataan penggunaan ADD (bermaterai), surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai), pakta integritas (bermaterai) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 20

Ketentuan mengenai :

- Format lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan desa dan lembar pemeriksaan SPJ desa dari Tim Fasilitasi PKD kecamatan;
- surat pertanggungjawaban mutlak telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya;
- surat pengantar dari desa ke Dinas PMD;
- surat permohonan pencairan ADD;
- kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai);
- surat pernyataan penggunaan ADD (bermaterai);
- Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai); dan
- pakta integritas (bermaterai),
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 100 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 16 Maret 2023


BUPATI BARITO KUALA

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 16 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 10

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 10 Tahun 2023
Tanggal 16 Maret 2023

**PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
BAGI DESA SE KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
				30%	40%	30%
1	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	381,310,300	114,393,090	152,524,120	114,393,090
2	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN BESAR	395,710,300	118,713,090	158,284,120	118,713,090
3	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN KECIL	380,099,000	114,029,700	152,039,600	114,029,700
4	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	442,404,700	132,721,410	176,961,880	132,721,410
5	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	392,404,700	117,721,410	156,961,880	117,721,410
6	TABUNGANEN	KARYA BARU	392,404,700	117,721,410	156,961,880	117,721,410
7	TABUNGANEN	TABUNGANEN PEMURUS	495,231,500	148,569,450	198,092,600	148,569,450
8	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS DALAM	387,299,000	116,189,700	154,919,600	116,189,700
9	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR	374,993,400	112,498,020	149,997,360	112,498,020
10	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	486,792,300	146,037,690	194,716,920	146,037,690
11	TABUNGANEN	SEI TERAS LUAR	380,393,300	114,117,990	152,157,320	114,117,990
12	TABUNGANEN	SEI TELAN MUARA	371,687,700	111,506,310	148,675,080	111,506,310
13	TABUNGANEN	BERINGIN KENCANA	387,299,100	116,189,730	154,919,640	116,189,730
14	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	455,709,400	136,712,820	182,283,760	136,712,820
15	TAMBAN	PURWOSARI II	435,286,600	130,585,980	174,114,640	130,585,980
16	TAMBAN	PURWOSARI I	475,306,300	142,591,890	190,122,520	142,591,890
17	TAMBAN	TAMBAN BANGUN	404,507,300	121,352,190	161,802,920	121,352,190
18	TAMBAN	TAMBAN MUARA	452,403,700	135,721,110	180,961,480	135,721,110
19	TAMBAN	TAMBAN KECIL	390,899,100	117,269,730	156,359,640	117,269,730
20	TAMBAN	TINGGIRAN II LUAR	493,725,900	148,117,770	197,490,360	148,117,770
21	TAMBAN	JELAPAT I	509,631,500	152,889,450	203,852,600	152,889,450
22	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	401,110,400	120,333,120	160,444,160	120,333,120
23	TAMBAN	PURWOSARI BARU	409,907,300	122,972,190	163,962,920	122,972,190
24	TAMBAN	SEKATA BARU	401,404,800	120,421,440	160,561,920	120,421,440
25	TAMBAN	KOANDA	373,487,700	112,046,310	149,395,080	112,046,310
26	TAMBAN	DAMSARI	376,793,400	113,038,020	150,717,360	113,038,020
27	TAMBAN	SIDOREJO	380,393,400	114,118,020	152,157,360	114,118,020
28	TAMBAN	JELAPAT BARU	466,011,900	139,803,570	186,404,760	139,803,570
29	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU	378,593,400	113,578,020	151,437,360	113,578,020
30	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	383,404,800	115,021,440	153,361,920	115,021,440
31	ANJIR PASAR	ANDAMAN	388,804,800	116,641,440	155,521,920	116,641,440
32	ANJIR PASAR	HILIR MESJID	374,993,400	112,498,020	149,997,360	112,498,020
33	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA	486,792,300	146,037,690	194,716,920	146,037,690
34	ANJIR PASAR	BANYIUR	378,299,100	113,489,730	151,319,640	113,489,730
35	ANJIR PASAR	GANDARAYA	379,804,800	113,941,440	151,921,920	113,941,440
36	ANJIR PASAR	GANDARIA	374,993,400	112,498,020	149,997,360	112,498,020
37	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA II	518,106,300	155,431,890	207,242,520	155,431,890
38	ANJIR PASAR	ANDAMAN II	387,299,100	116,189,730	154,919,640	116,189,730
39	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR II	393,616,100	118,084,830	157,446,440	118,084,830
40	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR I	391,816,100	117,544,830	156,726,440	117,544,830
41	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR LAMA	460,611,900	138,183,570	184,244,760	138,183,570
42	ANJIR PASAR	PANDAN SARI	381,604,800	114,481,440	152,641,920	114,481,440
43	ANJIR PASAR	MENTAREN	379,804,800	113,941,440	151,921,920	113,941,440
44	ANJIR PASAR	BARUNAI BARU	371,393,400	111,418,020	148,557,360	111,418,020
45	ANJIR PASAR	DANAU KARYA	383,699,100	115,109,730	153,479,640	115,109,730
46	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA	381,899,100	114,569,730	152,759,640	114,569,730

47	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA	459,106,300	137,731,890	183,642,520	137,731,890
48	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR	374,993,400	112,498,020	149,997,360	112,498,020
49	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA TENGAH	465,423,300	139,626,990	186,169,320	139,626,990
50	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT LAMA	371,393,400	111,418,020	148,557,360	111,418,020
51	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU	388,510,400	116,553,120	155,404,160	116,553,120
52	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA LAMA	436,792,300	131,037,690	174,716,920	131,037,690
53	ANJIR MUARA	SUNGAI PUNGGU	379,804,800	113,941,440	151,921,920	113,941,440
54	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU I	381,604,800	114,481,440	152,641,920	114,481,440
55	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR BARU	379,510,400	113,853,120	151,804,160	113,853,120
56	ANJIR MUARA	SEI PUNGGU BARU	387,004,800	116,101,440	154,801,920	116,101,440
57	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA I	398,813,000	119,643,900	159,525,200	119,643,900
58	ANJIR MUARA	SEPAKAT BARSAMA	381,310,400	114,393,120	152,524,160	114,393,120
59	ANJIR MUARA	MARABAHAN BARU	378,593,400	113,578,020	151,437,360	113,578,020
60	ANJIR MUARA	BERINGIN JAYA	371,393,400	111,418,020	148,557,360	111,418,020
61	ALALAK	PULAU ALALAK	416,021,200	124,806,360	166,408,480	124,806,360
62	ALALAK	PULAU SEWANGI	406,013,000	121,803,900	162,405,200	121,803,900
63	ALALAK	PULAU SUGARA	404,213,000	121,263,900	161,685,200	121,263,900
64	ALALAK	SUNGAI LUMBAH	467,811,900	140,343,570	187,124,760	140,343,570
65	ALALAK	BERANGAS TIMUR	509,925,900	152,977,770	203,970,360	152,977,770
66	ALALAK	SEI SEMANGAT BHAKTI	385,204,800	115,561,440	154,081,920	115,561,440
67	ALALAK	SUNGAI PITUNG	378,299,100	113,489,730	151,319,640	113,489,730
68	ALALAK	BELANDEAN MUARA	382,193,400	114,658,020	152,877,360	114,658,020
69	ALALAK	BELANDEAN	396,004,800	118,801,440	158,401,920	118,801,440
70	ALALAK	TANJUNG HARAPAN	371,687,700	111,506,310	148,675,080	111,506,310
71	ALALAK	SEMANGAT DALAM	556,718,274	167,015,482	222,687,310	167,015,482
72	ALALAK	BERINGIN	479,620,200	143,886,060	191,848,080	143,886,060
73	ALALAK	SEMANGAT KARYA	388,804,800	116,641,440	155,521,920	116,641,440
74	ALALAK	PANCA KARYA	376,499,100	112,949,730	150,599,640	112,949,730
75	ALALAK	TATAH MESJID	449,338,300	134,801,490	179,735,320	134,801,490
76	MANDASTANA	TERANTANG	423,424,400	127,027,320	169,369,760	127,027,320
77	MANDASTANA	TANIPAH	378,593,400	113,578,020	151,437,360	113,578,020
78	MANDASTANA	PUNTIK LUAR	394,204,800	118,261,440	157,681,920	118,261,440
79	MANDASTANA	PUNTIK DALAM	435,204,800	130,561,440	174,081,920	130,561,440
80	MANDASTANA	TABING RIMBAH	468,106,300	140,431,890	187,242,520	140,431,890
81	MANDASTANA	PANTAI HAMBawang	390,310,400	117,093,120	156,124,160	117,093,120
82	MANDASTANA	TATAH ALAYUNG	381,899,100	114,569,730	152,759,640	114,569,730
83	MANDASTANA	PUNTIK TENGAH	450,898,000	135,269,400	180,359,200	135,269,400
84	MANDASTANA	LOKRAWA	385,793,400	115,738,020	154,317,360	115,738,020
85	MANDASTANA	SEI RAMANIA	383,699,100	115,109,730	153,479,640	115,109,730
86	MANDASTANA	BANGKIT BARU	374,993,400	112,498,020	149,997,360	112,498,020
87	MANDASTANA	ANTASAN SEGERA	378,593,400	113,578,020	151,437,360	113,578,020
88	MANDASTANA	KARANG BUNGA	467,107,300	140,132,190	186,842,920	140,132,190
89	MANDASTANA	KARANG INDAH	501,192,300	150,357,690	200,476,920	150,357,690
90	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	465,423,300	139,626,990	186,169,320	139,626,990
91	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	448,509,400	134,552,820	179,403,760	134,552,820
92	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA ASAHI	457,509,400	137,252,820	183,003,760	137,252,820
93	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA	474,423,300	142,326,990	189,769,320	142,326,990
94	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI	395,710,400	118,713,120	158,284,160	118,713,120
95	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARJA	381,604,800	114,481,440	152,641,920	114,481,440
96	RANTAU BADAUH	SINAR BARU	390,604,800	117,181,440	156,241,920	117,181,440
97	RANTAU BADAUH	SUNGAI BAMBAN	441,603,700	132,481,110	176,641,480	132,481,110
98	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	506,325,900	151,897,770	202,530,360	151,897,770
99	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	378,004,800	113,401,440	151,201,920	113,401,440
100	BELAWANG	SUNGAI SELUANG	371,393,400	111,418,020	148,557,360	111,418,020
101	BELAWANG	BELAWANG	440,392,300	132,117,690	176,156,920	132,117,690
102	BELAWANG	BAMBANGIN	369,887,700	110,966,310	147,955,080	110,966,310
103	BELAWANG	SUKARMAI	376,793,400	113,038,020	150,717,360	113,038,020
104	BELAWANG	SUNGAI SELUANG PASAR	441,898,000	132,569,400	176,759,200	132,569,400

105	BELAWANG	SAMUDA	378,299,100	113,489,730	151,319,640	113,489,730
106	BELAWANG	PARIMATA	378,593,400	113,578,020	151,437,360	113,578,020
107	BELAWANG	KARANG DUKUH	392,699,100	117,809,730	157,079,640	117,809,730
108	BELAWANG	PATIH SELERA	388,804,800	116,641,440	155,521,920	116,641,440
109	BELAWANG	KARANG BUAH	375,287,700	112,586,310	150,115,080	112,586,310
110	BELAWANG	BINAAN BARU	373,193,400	111,958,020	149,277,360	111,958,020
111	BELAWANG	RANGGA SURYA	387,921,800	116,376,540	155,168,720	116,376,540
112	CERBON	SUNGAI KAMBAT	379,804,800	113,941,440	151,921,920	113,941,440
113	CERBON	SUNGAI RASAU	378,004,800	113,401,440	151,201,920	113,401,440
114	CERBON	SIMPANG NUNGKI	385,204,800	115,561,440	154,081,920	115,561,440
115	CERBON	SAWAHAN	400,227,500	120,068,250	160,091,000	120,068,250
116	CERBON	BANTUIL	460,611,900	138,183,570	184,244,760	138,183,570
117	CERBON	BADANDAN	380,099,100	114,029,730	152,039,640	114,029,730
118	CERBON	SEI TUNJANG	371,393,400	111,418,020	148,557,360	111,418,020
119	CERBON	SEI RAYA	371,393,400	111,418,020	148,557,360	111,418,020
120	BAKUMPAI	BANUA ANYAR	378,299,100	113,489,730	151,319,640	113,489,730
121	BAKUMPAI	MURUNG RAYA	378,299,100	113,489,730	151,319,640	113,489,730
122	BAKUMPAI	PALINGKAU	403,533,200	121,059,960	161,413,280	121,059,960
123	BAKUMPAI	BALUKUNG	381,604,800	114,481,440	152,641,920	114,481,440
124	BAKUMPAI	BANITAN	381,310,400	114,393,120	152,524,160	114,393,120
125	BAKUMPAI	BATIK	373,193,400	111,958,020	149,277,360	111,958,020
126	BAKUMPAI	BAHALAYUNG	373,193,400	111,958,020	149,277,360	111,958,020
127	BAKUMPAI	SUNGAI SELIRIK	429,510,400	128,853,120	171,804,160	128,853,120
128	KURIPAN	JAMBU BARU	403,238,800	120,971,640	161,295,520	120,971,640
129	KURIPAN	JAMBU	383,110,400	114,933,120	153,244,160	114,933,120
130	KURIPAN	KABUAU	386,416,100	115,924,830	154,566,440	115,924,830
131	KURIPAN	JARENANG	373,193,400	111,958,020	149,277,360	111,958,020
132	KURIPAN	TABATAN	388,216,100	116,464,830	155,286,440	116,464,830
133	KURIPAN	KURIPAN	389,099,100	116,729,730	155,639,640	116,729,730
134	KURIPAN	TABATAN BARU	396,921,800	119,076,540	158,768,720	119,076,540
135	KURIPAN	ASIA BARU	384,910,400	115,473,120	153,964,160	115,473,120
136	KURIPAN	RIMBUN TULANG	378,593,400	113,578,020	151,437,360	113,578,020
137	TABUKAN	PANTANG RAYA	381,604,800	114,481,440	152,641,920	114,481,440
138	TABUKAN	TABUKAN RAYA	436,792,300	131,037,690	174,716,920	131,037,690
139	TABUKAN	TELUK TAMBA	436,498,000	130,949,400	174,599,200	130,949,400
140	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	372,899,100	111,869,730	149,159,640	111,869,730
141	TABUKAN	TAMBA JAYA	378,004,800	113,401,440	151,201,920	113,401,440
142	TABUKAN	MUARA PULAU	401,733,200	120,519,960	160,693,280	120,519,960
143	TABUKAN	KARYA INDAH	388,216,100	116,464,830	155,286,440	116,464,830
144	TABUKAN	BANDAR KARYA	371,687,700	111,506,310	148,675,080	111,506,310
145	TABUKAN	KARYA MAKMUR	378,299,100	113,489,730	151,319,640	113,489,730
146	TABUKAN	KARYA JADI	438,298,000	131,489,400	175,319,200	131,489,400
147	TABUKAN	PANTANG BARU	373,193,400	111,958,020	149,277,360	111,958,020
148	MEKARSARI	MEKARSARI	487,114,500	146,134,350	194,845,800	146,134,350
149	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	411,413,000	123,423,900	164,565,200	123,423,900
150	MEKARSARI	TINGGIRAN TENGAH	381,899,100	114,569,730	152,759,640	114,569,730
151	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	421,918,700	126,575,610	168,767,480	126,575,610
152	MEKARSARI	JELAPAT II	395,416,100	118,624,830	158,166,440	118,624,830
153	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	395,710,400	118,713,120	158,284,160	118,713,120
154	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	421,421,200	126,426,360	168,568,480	126,426,360
155	MEKARSARI	KARANG MEKAR	378,299,100	113,489,730	151,319,640	113,489,730
156	MEKARSARI	INDAH SARI	375,287,700	112,586,310	150,115,080	112,586,310
157	BARAMBAI	BARAMBAI	452,403,700	135,721,110	180,961,480	135,721,110
158	BARAMBAI	SUNGAI KALI	459,309,400	137,792,820	183,723,760	137,792,820
159	BARAMBAI	PENDALAMAN	385,499,000	115,649,700	154,199,600	115,649,700
160	BARAMBAI	HANDIL BARABAI	373,487,700	112,046,310	149,395,080	112,046,310
161	BARAMBAI	BAGAGAP	397,510,300	119,253,090	159,004,120	119,253,090
162	BARAMBAI	BARAMBAI KARYA TANI	381,899,000	114,569,700	152,759,600	114,569,700

163	BARAMBAI	PENDALAMAN BARU	387,299,000	116,189,700	154,919,600	116,189,700
164	BARAMBAI	KARYA BARU	392,110,300	117,633,090	156,844,120	117,633,090
165	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI	487,611,800	146,283,540	195,044,720	146,283,540
166	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KANAN	402,910,300	120,873,090	161,164,120	120,873,090
167	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI DALAM	466,803,700	140,041,110	186,721,480	140,041,110
168	MARABAHAN	PENGHULU	428,086,700	128,426,010	171,234,680	128,426,010
169	MARABAHAN	BAGUS	446,709,400	134,012,820	178,683,760	134,012,820
170	MARABAHAN	BALIUK	364,487,700	109,346,310	145,795,080	109,346,310
171	MARABAHAN	ANTAR BARU	378,299,000	113,489,700	151,319,600	113,489,700
172	MARABAHAN	ANTAR JAYA	380,099,000	114,029,700	152,039,600	114,029,700
173	MARABAHAN	ANTAR RAYA	451,815,000	135,544,500	180,726,000	135,544,500
174	MARABAHAN	SIDO MAKMUR	377,087,700	113,126,310	150,835,080	113,126,310
175	MARABAHAN	KARYA MAJU	374,993,300	112,497,990	149,997,320	112,497,990
176	WANARAYA	KOLAM KIRI	558,392,300	167,517,690	223,356,920	167,517,690
177	WANARAYA	ROHAM RAYA	511,698,000	153,509,400	204,679,200	153,509,400
178	WANARAYA	SIMPANG JAYA	493,992,300	148,197,690	197,596,920	148,197,690
179	WANARAYA	TUMIH	382,487,700	114,746,310	152,995,080	114,746,310
180	WANARAYA	PINANG HABANG	493,992,300	148,197,690	197,596,920	148,197,690
181	WANARAYA	WARINGIN KENCANA	428,887,700	128,666,310	171,555,080	128,666,310
182	WANARAYA	BABAT RAYA	436,087,700	130,826,310	174,435,080	130,826,310
183	WANARAYA	KOLAM KANAN	455,086,600	136,525,980	182,034,640	136,525,980
184	WANARAYA	SIDOMULYO	568,898,000	170,669,400	227,559,200	170,669,400
185	WANARAYA	KOLAM MAKMUR	520,992,300	156,297,690	208,396,920	156,297,690
186	WANARAYA	SURYA KANTA	499,392,300	149,817,690	199,756,920	149,817,690
187	WANARAYA	SUMBER RAHAYU	497,886,600	149,365,980	199,154,640	149,365,980
188	WANARAYA	DWIPASARI	382,193,300	114,657,990	152,877,320	114,657,990
189	JEJANGKIT	SAMPURNA	387,593,300	116,277,990	155,037,320	116,277,990
190	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT	378,593,300	113,577,990	151,437,320	113,577,990
191	JEJANGKIT	BAHANDANG	376,499,000	112,949,700	150,599,600	112,949,700
192	JEJANGKIT	JEJANGKIT TIMUR	402,321,800	120,696,540	160,928,720	120,696,540
193	JEJANGKIT	CAHAYA BARU	387,299,000	116,189,700	154,919,600	116,189,700
194	JEJANGKIT	JEJANGKIT PASAR	383,699,000	115,109,700	153,479,600	115,109,700
195	JEJANGKIT	JEJANGKIT MUARA	383,699,000	115,109,700	153,479,600	115,109,700
JUMLAH			80,094,861,774	24,028,458,532	32,037,944,710	24,028,458,532



 BUPATI BARITO KUALA

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai dan Insentif RT/RW	ALOKASI FORMULA										Alokasi Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Pembulatan
				Jumlah Penduduk Miskin (%)	Bobot	Jumlah Penduduk (Jawa)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkauan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula			
1	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	285.445.639	0,48	6	1.451	7	30,00	8	53,85	8	29	95.864.753	381.310.391	381.310.300	
2	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN BESAR	299.845.639	0,91	6	1.215	7	26,00	8	59,59	8	29	95.864.753	395.710.391	396.710.300	
3	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN KECIL	290.845.639	0,77	6	1.037	7	15,00	7	40,09	7	27	89.253.390	380.099.029	380.099.000	
4	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	299.845.639	1,67	6	1.735	8	15,00	7	39,76	7	28	92.559.071	442.404.710	442.404.700	
5	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	299.845.639	0,22	6	1.849	8	11,00	7	34,37	7	28	92.559.071	392.404.710	392.404.700	
6	TABUNGANEN	KARYA BARU	299.845.639	0,57	6	1.583	8	13,00	7	43,83	7	28	92.559.071	392.404.710	392.404.700	
7	TABUNGANEN	TABUNGANEN PEMURUS	399.061.051	0,85	6	4.477	9	31,00	8	44,19	7	30	99.170.434	495.231.485	495.231.500	
8	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS DALAM	299.045.639	0,86	6	1.044	7	12,00	7	42,73	7	27	89.253.390	387.299.029	387.299.000	
9	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR	289.045.639	0,77	6	650	6	12,00	7	40,01	7	26	85.947.709	374.993.348	374.993.400	
10	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	350.844.577	5,59	7	1.009	7	3,00	6	23,49	6	26	85.947.709	486.792.286	486.792.300	
11	TABUNGANEN	SEI TERAS LUAR	294.445.639	3,83	6	1.156	7	10,00	6	43,66	7	26	85.947.709	380.393.348	380.393.300	
12	TABUNGANEN	SEI TELAN MUARA	289.045.639	3,47	6	754	6	10,00	6	41,47	7	25	82.642.028	371.687.667	371.687.700	
13	TABUNGANEN	BERINGIN KENCANA	298.045.639	2,83	6	1.482	7	25,00	7	49,40	7	27	89.253.390	387.299.029	387.299.100	
14	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	359.844.577	1,07	6	1.773	8	27,00	8	48,20	7	29	95.864.753	455.709.330	455.709.400	
15	TAMBAN	PURWOSARI II	352.644.577	2,12	6	1.369	7	9,00	6	23,50	6	25	82.642.028	435.286.605	435.286.600	
16	TAMBAN	PURWOSARI I	386.052.814	1,08	6	2.231	8	15,75	7	18,89	6	27	89.253.390	475.306.204	475.306.300	
17	TAMBAN	TAMBAN BANGUN	315.253.876	2,73	6	2.197	8	3,40	6	32,73	7	27	89.253.390	404.507.266	404.507.300	
18	TAMBAN	TAMBAN MUARA	359.844.577	1,63	6	1.716	8	20,00	7	30,04	7	28	92.559.071	452.403.649	452.403.700	
19	TAMBAN	TAMBAN KECIL	301.645.639	2,76	6	2.393	8	5,40	6	35,80	7	27	89.253.390	390.899.029	390.899.100	
20	TAMBAN	TINGGIRAN II LUAR	397.861.051	2,98	6	4.266	9	11,00	7	34,19	7	29	95.864.753	493.725.804	493.725.900	
21	TAMBAN	JELAPATI	410.461.051	2,10	6	6.045	10	18,00	7	32,48	7	30	99.170.434	509.631.485	509.631.500	
22	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	306.245.639	9,46	7	1.884	8	15,00	7	34,62	7	29	95.864.753	401.110.391	401.110.400	

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai dan Insentif RT/RW	ALOKASI FORMULA										Alokasi Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Pembelian
				Jumlah Penduduk Miskin (%)	Bobot	Jumlah Penduduk (Jawa)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkauan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula			
23	TAMBAN	PURWOSARI BARU	320,653,676	1,40	6	2,357	8	8,50	6	33,36	7	27	89,263,390		409,907,266	409,907,300
24	TAMBAN	SEKATA BARU	308,845,639	1,41	6	1,352	7	41,90	8	31,83	7	28	92,559,071		401,404,710	401,404,800
25	TAMBAN	KOANDA	290,845,639	1,15	6	1,043	7	8,00	6	23,76	6	25	82,642,028		373,487,667	373,487,700
26	TAMBAN	DAMSARI	290,845,639	2,76	6	1,051	7	8,50	6	32,22	7	26	85,947,709		376,793,348	376,793,400
27	TAMBAN	SIDOREJO	294,445,639	1,32	6	1,437	7	5,26	6	29,41	7	26	85,947,709		380,393,348	380,393,400
28	TAMBAN	JELAPAT BARU	373,452,814	1,17	6	2,387	8	18,00	7	41,93	7	28	92,559,071		466,011,886	466,011,900
29	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU	282,645,639	0,49	6	1,030	7	3,50	6	32,71	7	26	85,947,709		376,593,348	376,593,400
30	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	290,845,639	17,45	9	992	6	6,50	6	34,27	7	28	92,559,071		383,404,710	383,404,800
31	ANJUR PASAR	ANDAMAN	286,245,639	12,34	8	1,387	7	8,00	6	41,84	7	28	92,559,071		388,804,710	388,804,800
32	ANJUR PASAR	HILIR MESJID	289,045,639	0,37	6	1,369	7	6,50	6	42,53	7	26	85,947,709		374,993,348	374,993,400
33	ANJUR PASAR	ANJUR PASAR KOTA	360,844,577	1,39	6	1,733	8	4,92	6	15,33	6	26	85,947,709	50,000,000	486,792,286	486,792,300
34	ANJUR PASAR	BANYUR	289,045,639	0,61	6	1,310	7	16,74	7	32,02	7	27	89,263,390		379,804,710	379,804,800
35	ANJUR PASAR	GANDARAYA	287,245,639	10,56	8	553	6	9,25	6	50,24	8	28	92,559,071		379,804,710	379,804,800
36	ANJUR PASAR	GANDARIA	299,045,639	0,61	6	820	6	11,37	7	43,01	7	26	85,947,709		374,993,348	374,993,400
37	ANJUR PASAR	ANJUR PASAR KOTA II	378,862,814	0,63	6	1,998	8	8,67	6	25,67	7	27	89,263,390	50,000,000	516,106,204	516,106,300
38	ANJUR PASAR	ANDAMAN II	298,045,639	5,64	7	1,106	7	9,50	6	41,92	7	27	89,263,390		387,299,029	387,299,100
39	ANJUR PASAR	ANJUR SEBERANG PASARI I	294,445,639	20,39	9	1,259	7	11,25	7	44,68	7	30	99,170,434		393,616,072	393,616,100
40	ANJUR PASAR	ANJUR SEBERANG PASAR I	292,645,639	22,05	9	1,443	7	11,25	7	44,03	7	30	99,170,434		391,816,072	391,816,100
41	ANJUR PASAR	ANJUR PASAR LAMA	368,062,814	0,55	6	2,178	8	11,00	7	37,05	7	28	92,559,071		460,611,886	460,611,900
42	ANJUR PASAR	PANDAN SARI	289,045,639	19,84	9	614	6	3,75	6	26,25	7	28	92,559,071		381,604,710	381,604,800
43	ANJUR PASAR	MENTAREN	287,245,639	18,60	9	580	6	3,00	6	39,08	7	28	92,559,071		379,804,710	379,804,800
44	ANJUR PASAR	BARUNAI BARU	285,445,639	3,03	6	1,097	7	3,50	6	41,79	7	26	85,947,709		371,393,348	371,393,400
45	ANJUR PASAR	DANAU KARYA	294,445,639	11,92	8	642	6	7,60	6	34,05	7	27	89,263,390		383,699,029	383,699,100
46	ANJUR MUARA	ANJUR SERAPAT MUARA	292,645,639	0,99	6	1,921	8	4,00	6	49,28	7	27	89,263,390		381,899,029	381,899,100
47	ANJUR MUARA	ANJUR MUARA KOTA	369,852,814	0,30	6	2,637	9	5,00	6	20,26	6	27	89,263,390		459,106,204	459,106,300
48	ANJUR MUARA	PATIH MUHUR	299,045,639	2,96	6	912	6	7,50	6	52,41	8	26	85,947,709		374,993,348	374,993,400
49	ANJUR MUARA	ANJUR MUARA KOTATENGGAH	366,252,814	15,71	9	2,282	8	7,00	6	37,01	7	30	99,170,434		465,423,246	465,423,300
50	ANJUR MUARA	ANJUR SERAPAT LAMA	285,445,639	1,27	6	1,181	7	10,00	6	39,09	7	26	85,947,709		371,393,348	371,393,400
51	ANJUR MUARA	ANJUR SERAPAT BARU	292,645,639	6,06	7	1,701	8	12,00	7	43,39	7	29	95,984,753		388,510,391	388,510,400
52	ANJUR MUARA	ANJUR MUARA LAMA	350,844,577	0,19	6	2,114	8	6,00	6	24,62	6	26	85,947,709		436,792,286	436,792,300
53	ANJUR MUARA	SUNGAI PUNGU	287,245,639	11,92	8	1,317	7	4,00	6	41,24	7	28	92,559,071		379,804,710	379,804,800
54	ANJUR MUARA	ANJUR SERAPAT BARU I	289,045,639	0,32	6	1,561	8	12,00	7	47,36	7	28	92,559,071		381,604,710	381,604,800
55	ANJUR MUARA	PATIH MUHUR BARU	283,645,639	3,29	6	972	6	7,5	10	41,35	7	29	96,864,753		379,510,391	379,510,400


NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai dan Insentif RT/RW	ALOKASI FORMULA								Alokasi Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Pembelian
				Jumlah Penduduk Miskin (%)	Bobot	Jumlah Penduduk (Jawa)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Kelempagaan	Bobot	Total Bobot		
56	ANJUR MUARA	SEI PUNGGU BARU	294,445,639	6.48	7	1,599	8	6.00	6	46.63	7	28	387,004,710	387,004,800
57	ANJUR MUARA	ANJUR SERAPAT MUARA I	306,263,876	1.29	6	2,248	8	16.00	7	34.47	7	28	398,812,947	398,813,000
58	ANJUR MUARA	SEPAKAT BARSAMA	285,445,639	4.82	6	606	6	9.5	10	42.93	7	29	381,310,391	381,310,400
59	ANJUR MUARA	MARABAHAN BARU	282,645,639	3.15	6	1,302	7	5.00	6	39.39	7	26	378,593,348	378,593,400
60	ANJUR MUARA	BERINGIN JAWA	285,445,639	1.07	6	1,212	7	6.25	6	32.45	7	26	371,393,348	371,393,400
61	ALALAK	PULAU ALALAK	323,462,113	0.32	6	3,136	9	1.21	6	35.20	7	28	416,021,184	416,021,200
62	ALALAK	PULAU SEWANGI	313,453,876	0.27	6	2,552	9	0.55	6	40.55	7	28	406,012,947	406,013,000
63	ALALAK	PULAU SUGARA	311,653,876	0.96	6	2,704	9	0.56	6	38.43	7	28	404,212,947	404,213,000
64	ALALAK	SUNGAI LUMBIAH	375,282,814	0.74	6	2,840	9	7.00	6	33.68	7	28	467,811,866	467,811,900
65	ALALAK	BERANGAS TIMUR	414,061,051	3.43	6	5,787	10	4.00	6	27.93	7	29	509,925,804	509,925,900
66	ALALAK	SEI SEMANGAT BHAKTI	282,645,639	8.96	7	1,733	8	3.50	6	40.96	7	28	385,204,710	385,204,800
67	ALALAK	SUNGAI PITUNG	289,045,639	0.75	6	1,072	7	11.92	7	41.35	7	27	378,299,029	378,299,100
68	ALALAK	BELANDEAN MUARA	286,245,639	0.51	6	1,380	7	8.63	6	35.17	7	26	382,193,348	382,193,400
69	ALALAK	BELANDEAN	303,445,639	0.66	6	1,539	8	16.86	7	40.91	7	28	396,004,710	396,004,800
70	ALALAK	TANJUNG HARAPAN	289,045,639	2.31	6	953	6	7.00	6	37.61	7	25	371,687,667	371,687,700
71	ALALAK	SEMANGAT DALAM	460,981,051	0.90	6	14,244	10	7.50	6	32.38	7	29	556,726,804	556,726,804
72	ALALAK	BERINGIN	387,061,051	0.73	6	3,270	9	5.50	6	36.78	7	28	479,620,123	479,620,200
73	ALALAK	SEMANGAT KARYA	286,245,639	8.77	7	1,539	8	3.50	6	30.65	7	28	388,804,710	388,804,800
74	ALALAK	PANCA KARYA	287,245,639	5.28	7	1,488	7	4.50	6	45.15	7	27	376,489,029	376,489,100
75	ALALAK	TATAH MESJID	346,862,113	31.25	10	2,339	8	3.50	6	42.80	7	31	449,336,228	449,336,300
76	MANDASTANA	TERPANTANG	324,253,876	24.55	9	1,837	8	8.00	6	48.91	7	30	423,424,309	423,424,400
77	MANDASTANA	TAMPAH	282,645,639	1.19	6	1,180	7	6.50	6	45.66	7	26	378,593,348	378,593,400
78	MANDASTANA	PUNTIK LUAR	301,645,639	0.38	6	1,867	8	10.50	7	38.26	7	28	394,204,710	394,204,800
79	MANDASTANA	PUNTIK DALAM	292,845,639	6.34	7	1,086	7	12.05	7	43.58	7	28	435,204,710	435,204,800
80	MANDASTANA	TABING RIMBAH	378,862,814	2.14	6	1,459	7	18.00	7	28.93	7	27	468,106,204	468,106,300
81	MANDASTANA	PANTAI HAMBANGWANG	294,445,639	9.21	7	1,322	7	11.00	7	50.40	8	29	390,310,391	390,310,400
82	MANDASTANA	TATAH ALAYUNG	292,645,639	0.90	6	1,112	7	12.00	7	35.25	7	27	381,899,029	381,899,100
83	MANDASTANA	PUNTIK TENGAH	361,644,577	2.20	6	1,923	8	10.00	6	36.07	7	27	450,897,967	450,898,000
84	MANDASTANA	LOKRAWA	298,845,639	0.49	6	1,232	7	8.00	6	43.68	7	26	385,793,348	385,793,400
85	MANDASTANA	SEIRAMANA	294,445,639	14.80	8	578	6	5.00	6	42.35	7	27	383,699,029	383,699,100
86	MANDASTANA	BAINGKIT BARU	289,045,639	0.83	6	721	6	12.00	7	47.07	7	26	374,993,348	374,993,400
87	MANDASTANA	ANTASAN SEGERA	292,645,639	2.82	6	746	6	10.00	6	51.33	8	26	378,593,348	378,593,400
88	MANDASTANA	KARANG BUNGA	327,853,876	0.24	6	2,041	8	8.03	6	44.95	7	27	467,107,266	467,107,300

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai dan Insentif RT/RW	ALOKASI FORMULA								Alokasi Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Pembelian		
				Jumlah Penduduk Miskin (%)	Bobot	Jumlah Penduduk (jiwa)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkauan	Bobot				Total Bobot	Alokasi Formula
89	MANDASTANA	KARANG INDAH	365,244,577	2,79	6	1,265	7	492	6	35,53	7	26	85,947,709	50,000,000	501,192,286	501,192,300
90	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	366,292,814	0,38	6	2,117	8	51,81	9	33,00	7	30	99,170,434		465,423,248	465,423,300
91	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	352,644,577	0,30	6	1,679	8	31,00	8	40,40	7	29	95,864,753		448,509,330	448,509,400
92	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA ASAH	361,644,577	9,90	7	2,044	8	33,00	8	19,45	6	29	95,864,753		457,509,330	457,509,400
93	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA	375,252,814	0,78	6	2,553	9	29,00	8	41,79	7	30	99,170,434		474,423,248	474,423,300
94	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI	299,845,639	0,85	6	1,882	8	47,00	8	43,40	7	29	95,864,753		395,710,391	395,710,400
95	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARAJA	289,045,639	12,81	8	951	6	16,00	7	39,65	7	28	92,559,071		381,604,710	381,604,800
96	RANTAU BADAUH	SINAR BARU	298,045,639	0,56	6	1,779	8	15,00	7	39,24	7	28	92,559,071		390,604,710	390,604,800
97	RANTAU BADAUH	SUNGAI BAMBAN	349,044,577	5,85	7	1,118	7	15,00	7	39,66	7	28	92,559,071		441,603,849	441,603,700
98	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	410,461,051	1,00	6	3,300	9	24,00	7	36,00	7	29	95,864,753		506,325,804	506,325,900
99	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	285,445,639	12,06	8	910	6	5,00	6	56,36	8	28	92,559,071		378,004,710	378,004,800
100	BELAWANG	SUNGAI SELUANG	285,445,639	8,00	7	554	6	6,00	6	32,70	7	26	85,947,709		371,393,348	371,393,400
101	BELAWANG	BELAWANG	354,444,577	1,55	6	1,487	7	7,00	6	25,02	7	26	85,947,709		440,392,286	440,392,300
102	BELAWANG	BAMBANGIN	287,245,639	1,29	6	861	6	4,00	6	37,83	7	25	82,642,028		369,887,667	369,887,700
103	BELAWANG	SUKARAJAI	290,845,639	0,50	6	1,190	7	5,00	6	39,24	7	26	85,947,709		376,793,348	376,793,400
104	BELAWANG	SUNGAI SELUANG PASAR	352,644,577	4,89	6	1,201	7	11,00	7	27,72	7	27	89,253,390		441,897,967	441,898,000
105	BELAWANG	SAMUDA	289,045,639	1,06	6	1,226	7	9,50	6	51,61	8	27	89,253,390		378,299,029	378,299,100
106	BELAWANG	PARIMATA	292,645,639	0,61	6	1,154	7	10,00	6	37,52	7	26	85,947,709		378,593,348	378,593,400
107	BELAWANG	KARANG DIKUH	303,445,639	7,96	7	1,151	7	2,50	6	49,18	7	27	89,253,390		392,699,029	392,699,100
108	BELAWANG	PATHI SELERA	296,245,639	0,63	6	1,745	8	6,50	6	52,74	8	28	92,559,071		388,804,710	388,804,800
109	BELAWANG	KARANG BUAH	292,645,639	0,50	6	804	6	2,50	6	37,27	7	25	82,642,028		375,287,667	375,287,700
110	BELAWANG	BINAN BARU	287,245,639	4,13	6	1,066	7	6,00	6	35,37	7	26	85,947,709		373,193,348	373,193,400
111	BELAWANG	RANGGA SURIYA	285,445,639	1,57	6	1,210	7	5,25	10	54,68	8	31	102,476,115		387,921,753	387,921,800
112	CERBON	SUNGAIKAMBAT	287,245,639	1,42	6	1,405	7	32,00	8	36,63	7	28	92,559,071		379,804,710	379,804,800
113	CERBON	SUNGAI PASAU	285,445,639	1,43	6	1,120	7	28,00	8	45,73	7	28	92,559,071		378,004,710	378,004,800
114	CERBON	SIMPANG NUNGI	292,645,639	2,88	6	1,540	8	19,50	7	38,07	7	28	92,559,071		385,204,710	385,204,800
115	CERBON	SAWAHAN	294,445,639	17,07	9	1,026	7	59,05	9	43,55	7	32	105,781,796		400,227,435	400,227,500
116	CERBON	BANTUL	368,062,814	0,26	6	2,332	8	17,65	7	29,14	7	28	92,559,071		460,611,886	460,611,900
117	CERBON	BADANDAN	290,845,639	3,62	6	1,493	7	20,15	7	35,87	7	27	89,253,390		380,099,029	380,099,100
118	CERBON	SEI TUNJANG	285,445,639	1,01	6	592	6	17,50	7	44,40	7	26	85,947,709		371,393,348	371,393,400
119	CERBON	SEI RAYA	285,445,639	0,67	6	890	6	12,15	7	40,24	7	26	85,947,709		371,393,348	371,393,400
120	BAKUMPAI	BAJUA ANYAR	299,045,639	1,23	6	1,139	7	21,00	7	44,45	7	27	89,253,390		378,299,029	378,299,100
121	BAKUMPAI	MURUNG RAYA	299,045,639	0,82	6	1,097	7	14,00	7	46,28	7	27	89,253,390		378,299,029	378,299,100

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai dan Insentif RT/RW	ALOKASI FORMULA										Alokasi Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Pembuatan
				Jumlah Penduduk Miskin (%)	Bobot	Jumlah Penduduk (Jawa)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkauan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula			
122	BAKUMPAL	PALINGKAU	294,445,639	26,15	10	793	6	55,00	9	56,73	8	33	109,087,477		403,533,116	403,533,200
123	BAKUMPAL	BALUKUNG	289,045,639	0,71	6	984	6	45,00	8	59,76	8	28	92,559,071		381,604,710	381,604,800
124	BAKUMPAL	BANITAN	285,445,639	2,08	6	980	6	59,00	9	64,51	8	29	95,964,753		381,310,391	381,310,400
125	BAKUMPAL	BATIK	287,245,639	2,23	6	1,345	7	8,00	6	32,96	7	26	85,947,709		373,193,348	373,193,400
126	BAKUMPAL	BAHALAYUNG	287,245,639	2,46	6	853	6	19,00	7	40,60	7	26	85,947,709		373,193,348	373,193,400
127	BAKUMPAL	SUNGA SELIRIK	283,645,639	23,52	9	518	6	18,00	7	46,65	7	29	95,964,753	60,000,000	423,510,391	423,510,400
128	KURIPAN	JAMBU BARU	290,845,639	28,24	10	606	6	84,00	10	56,67	8	34	112,393,158		403,238,797	403,238,800
129	KURIPAN	JAMBU	287,245,639	12,30	8	622	6	36,00	8	41,99	7	29	95,964,753		383,110,391	383,110,400
130	KURIPAN	KABAU	287,245,639	40,33	10	659	6	24,00	7	34,04	7	30	98,170,434		386,416,072	386,416,100
131	KURIPAN	JARENANG	287,245,639	4,54	6	532	6	26,00	7	45,01	7	26	85,947,709		373,193,348	373,193,400
132	KURIPAN	TABATAN	289,045,639	19,16	9	866	6	35,00	8	33,15	7	30	98,170,434		388,216,072	388,216,100
133	KURIPAN	KURIPAN	289,845,639	6,52	7	726	6	22,50	7	39,53	7	27	88,253,390		389,099,029	389,099,100
134	KURIPAN	TABATAN BARU	294,445,639	12,60	8	983	6	70,50	9	53,78	8	31	102,476,115		395,921,753	395,921,800
135	KURIPAN	ASIA BARU	289,045,639	18,06	9	524	6	24,00	7	49,19	7	29	95,964,753		384,910,391	384,910,400
136	KURIPAN	RIMBUN TULANG	292,645,639	8,86	7	682	6	22,50	7	22,82	6	26	86,947,709		378,593,348	378,593,400
137	TABUKAN	PANTANG RAYA	289,045,639	7,15	7	1,035	7	14,00	7	39,08	7	28	92,559,071		381,604,710	381,604,800
138	TABUKAN	TABUKAN RAYA	380,844,577	2,37	6	1,014	7	0,31	6	38,97	7	26	86,947,709		436,792,286	436,792,300
139	TABUKAN	TELUK TAMBA	347,244,577	5,98	7	936	6	12,10	7	37,26	7	27	89,253,390		436,497,967	436,498,000
140	TABUKAN	PANTAU BAMBAN	283,645,639	1,22	6	575	6	12,00	7	64,36	8	27	89,253,390		372,899,029	372,899,100
141	TABUKAN	TAMBA JAYA	285,445,639	2,17	6	368	6	36,50	8	53,28	8	28	92,559,071		378,004,710	378,004,800
142	TABUKAN	MUARA PULAU	292,645,639	44,76	10	1,057	7	31,00	8	67,89	8	33	109,087,477		401,733,116	401,733,200
143	TABUKAN	KARYA INDAH	289,045,639	30,42	10	546	6	5,55	6	51,64	8	30	98,170,434		388,216,072	388,216,100
144	TABUKAN	BANDAR KARYA	289,045,639	0,81	6	860	6	1,58	6	47,03	7	25	82,842,028		371,687,667	371,687,700
145	TABUKAN	KARYA MAKMUR	289,045,639	0,89	6	1,466	7	24,65	7	48,21	7	27	89,253,390		378,298,029	378,298,100
146	TABUKAN	KARYA JADI	349,044,577	1,58	6	1,013	7	16,30	7	37,84	7	27	89,253,390		438,297,967	438,298,000
147	TABUKAN	PANTANG BARU	287,245,639	1,06	6	752	6	14,00	7	49,31	7	26	86,947,709		373,193,348	373,193,400
148	MEKARSARI	MEKARSARI	397,861,051	1,81	6	3,044	9	9,50	6	24,51	6	27	89,253,390		487,114,441	487,114,500
149	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	318,863,876	1,20	6	2,076	8	16,00	7	31,62	7	28	92,559,071		411,412,947	411,413,000
150	MEKARSARI	TINGGIRAN TENGAH	292,645,639	2,86	6	1,168	7	25,00	7	44,41	7	27	86,253,390		381,899,029	381,899,100
151	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	326,053,876	1,58	6	3,233	9	20,00	7	31,93	7	29	96,964,753		421,918,628	421,918,700
152	MEKARSARI	JELAPAT II	296,245,639	5,96	7	1,962	8	30,00	8	28,99	7	30	98,170,434		395,416,072	395,416,100
153	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	289,845,639	21,98	9	1,333	7	10,00	6	30,90	7	29	96,964,753		395,710,391	395,710,400
154	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	328,862,113	1,89	6	3,803	9	10,00	6	35,61	7	28	92,559,071		421,421,194	421,421,200

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Biaya Pegawai dan Insentif RT/RW	ALOKASI FORMULA										Alokasi Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Pembelian
				Jumlah Penduduk Miskin (%)	Bobot	Jumlah Pentunjuk (Jmla)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkauan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula			
155	MEKARSARI	KARANG MEKAR	289,045,639	3,45	6	1,159	7	14,00	7	34,14	7	27	89,253,390		376,299,029	378,299,100
156	MEKARSARI	INDAH SARI	282,645,639	1,31	6	919	6	9,00	6	42,94	7	25	82,642,028		375,287,667	376,287,700
157	BARAMBAI	BARAMBAI	369,844,577	0,34	6	1,757	8	20,00	7	32,19	7	28	92,559,071		452,403,649	452,403,700
158	BARAMBAI	SUNGAI KALI	363,444,577	1,36	6	1,615	8	30,00	8	44,35	7	29	96,864,753		459,309,330	459,309,400
159	BARAMBAI	PENDALAMAN	286,245,639	0,91	6	1,540	8	9,00	6	39,03	7	27	89,253,390		386,499,029	385,499,000
160	BARAMBAI	HANDIL BARABAI	290,845,639	1,34	6	673	6	10,00	6	39,56	7	25	82,642,028		373,487,667	373,487,700
161	BARAMBAI	BAGAGAP	301,645,639	0,85	6	1,537	8	32,00	8	45,88	7	29	96,864,753		397,510,391	397,510,300
162	BARAMBAI	BARAMBAI KARYA TANI	282,645,639	2,32	6	1,207	7	8,00	6	52,16	8	27	89,253,390		381,899,029	381,899,000
163	BARAMBAI	PENDALAMAN BARU	288,045,639	3,82	6	1,543	8	7,00	6	42,41	7	27	89,253,390		387,299,029	387,299,000
164	BARAMBAI	KARYA BARU	286,245,639	27,59	10	602	6	7,00	6	48,52	7	29	96,864,753		392,110,391	392,110,300
165	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI	395,052,814	2,65	6	2,455	8	16,00	7	43,15	7	28	92,559,071		487,611,886	487,611,800
166	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAMKANAN	307,045,639	1,24	6	1,680	8	27,00	8	35,60	7	29	96,864,753		402,910,391	402,910,300
167	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KRIDALAM	374,244,577	2,49	6	1,984	8	17,00	7	40,04	7	28	92,559,071		468,803,649	468,803,700
168	MARABAHAN	PENGHULU	345,444,577	3,71	6	597	6	7,50	6	25,75	7	25	82,642,028		428,086,605	428,086,700
169	MARABAHAN	BAGUS	350,844,577	19,63	9	1,077	7	10,50	7	22,15	6	29	96,864,753		446,709,330	446,709,400
170	MARABAHAN	BALUK	281,845,639	3,69	6	601	6	5,00	6	35,37	7	25	82,642,028		364,487,667	364,487,700
171	MARABAHAN	ANTAR BARU	289,045,639	2,02	6	1,087	7	24,19	7	45,18	7	27	89,253,390		378,299,029	378,299,000
172	MARABAHAN	ANTAR JAYA	290,845,639	1,52	6	986	6	28,00	8	45,37	7	27	89,253,390		380,099,029	380,099,000
173	MARABAHAN	ANTAR RAYA	352,644,577	12,41	8	1,014	7	28,86	8	45,00	7	30	99,170,434		451,815,011	451,815,000
174	MARABAHAN	SIDO MAKULUR	294,445,639	0,44	6	907	6	7,00	6	38,46	7	25	82,642,028		377,087,667	377,087,700
175	MARABAHAN	KARYA MAJU	289,045,639	1,59	6	628	6	7,95	6	56,07	8	26	96,947,709		374,993,348	374,993,300
176	WANARAYA	KOLAM KIRI	372,444,577	1,29	6	1,474	7	2,50	6	29,08	7	26	86,947,709	100,000,000	558,392,286	558,392,300
177	WANARAYA	ROHAM RAYA	372,444,577	1,40	6	2,005	8	4,00	6	32,94	7	27	89,253,390	50,000,000	511,697,967	511,698,000
178	WANARAYA	SIMPANG JAYA	358,044,577	0,39	6	1,031	7	2,50	6	37,62	7	26	96,947,709	50,000,000	493,992,286	493,992,300
179	WANARAYA	TUMIH	299,845,639	3,48	6	862	6	4,50	6	46,47	7	25	82,642,028		382,487,667	382,487,700
180	WANARAYA	PINANG HABANG	356,044,577	3,80	6	1,007	7	2,50	6	40,12	7	26	96,947,709	50,000,000	493,992,286	493,992,300
181	WANARAYA	WARINGIN KENCANA	286,245,639	0,68	6	737	6	2,50	6	43,93	7	25	82,642,028	50,000,000	428,887,667	428,887,700
182	WANARAYA	BABAT RAYA	303,445,639	2,01	6	646	6	2,50	6	34,04	7	25	82,642,028	50,000,000	436,087,667	436,087,700
183	WANARAYA	KOLAM KANAN	372,444,577	1,56	6	963	6	3,50	6	33,11	7	25	82,642,028		455,086,605	455,086,600
184	WANARAYA	SIDOMULYO	379,644,577	1,24	6	1,694	8	3,50	6	34,70	7	27	89,253,390	100,000,000	568,597,967	568,598,000
185	WANARAYA	KOLAM MAKULUR	386,044,577	0,68	6	1,476	7	2,00	6	48,39	7	26	96,947,709	50,000,000	520,992,286	520,992,300
186	WANARAYA	SURYA KANTA	363,444,577	0,60	6	1,343	7	2,50	6	40,34	7	26	96,947,709	50,000,000	499,392,286	499,392,300
187	WANARAYA	SUMBER RAHAYU	366,244,577	1,44	6	901	6	2,50	6	36,83	7	25	82,642,028	50,000,000	497,886,605	497,886,600

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai dan Insentif RT/RW	ALOKASI FORMULA								Alokasi Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa (A/D) Per Desa	Pembelian
				Jumlah Penduduk Miskin (%)	Bobot	Jumlah Penduduk (Jawa)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkauan	Bobot	Total Bobot		
188	WAMARAYA	DWIPASARI	296,245,639	3.37	6	657	6	2.50	6	54.22	8	26	382,193,348	382,193,300
189	JEJANGKIT	SAMPURNA	301,645,639	1.50	6	798	6	15.00	7	39.67	7	26	387,593,348	387,593,300
190	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT	292,645,639	1.80	6	944	6	16.00	7	38.22	7	26	378,593,348	378,593,300
191	JEJANGKIT	BAHANDANG	287,245,639	1.64	6	365	6	18.00	7	63.77	8	27	376,499,029	376,499,000
192	JEJANGKIT	JEJANGKIT TIMUR	299,845,639	1.31	6	1,072	7	120.00	10	52.75	8	31	402,321,753	402,321,800
193	JEJANGKIT	CAHAYA BARU	298,045,639	1.58	6	1,205	7	10.00	6	55.76	8	27	387,299,029	387,299,000
194	JEJANGKIT	JEJANGKIT PASAR	294,445,639	3.09	6	1,325	7	12.00	7	32.11	7	27	383,699,029	383,699,000
195	JEJANGKIT	JEJANGKIT MUARA	294,445,639	0.52	6	1,342	7	12.00	7	36.84	7	27	383,699,029	383,699,000
Jumlah			61,369,799,583	9.78	-	281,854	-	2,862.50	-	7,806.93	-	5,362	80,094,861,774	80,094,861,774



 BUPATI BARITO KUALA